

BAB I

PENDAHULUAN

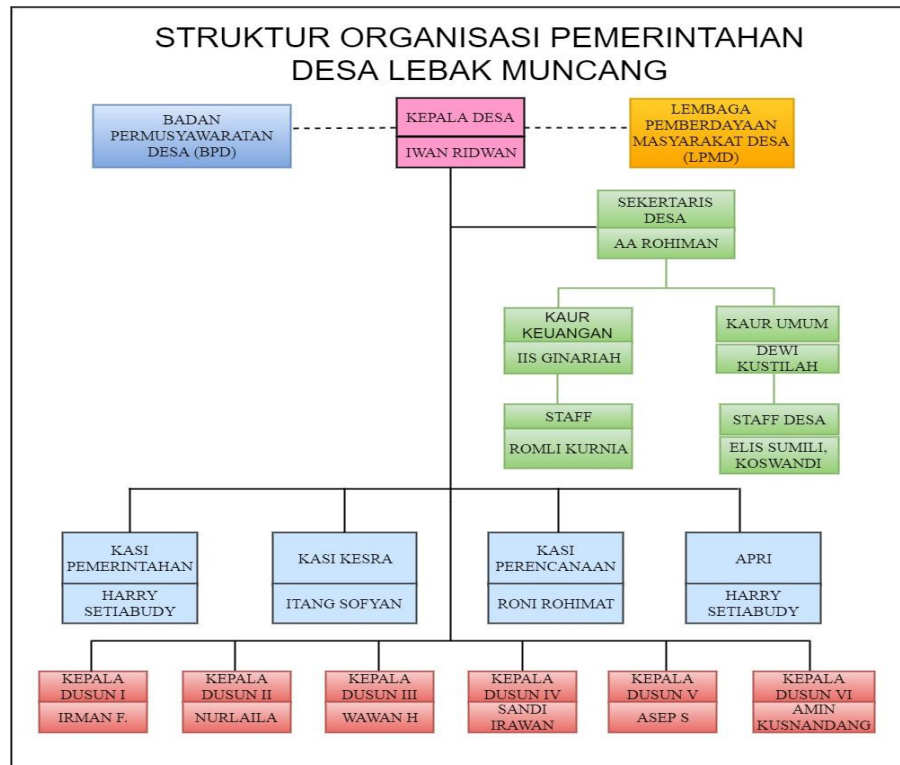
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kampung Sabilulungan Bersih merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk desa yang belum diintervensi program *Ecovillage*. Program *Ecovillage* merupakan program pemerintah sebagai upaya mengembangkan desa berbudaya lingkungan. Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang ramah lingkungan yang berkelanjutan, cerdas secara ekologis, gotong royong, dan masyarakat yang mandiri. Tujuan dari program Kampung Saber yaitu terciptanya kampung/desa dimana masyarakatnya dapat memahami masalah lingkungan hidup secara mandiri dan menemukan solusi atas masalah tersebut, serta melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat terwujudnya kampung yang bersih dan nyaman. Dalam menerapkan program tersebut dibutuhkan kader-kader yang berpartisipasi seperti aparat desa, BPD, LSM Ketua RW, PKK, pelaku usaha, kelompok tani/ternak, karang taruna, tokoh, dll (DLH Kabupaten Bandung, 2019).

Terdapat beberapa indikator dari program Kampung Saber yaitu terciptanya kader lingkungan yang menjadi pelopor kegiatan-kegiatan lingkungan hidup, menimbulkan kebiasaan gotong royong antar masyarakat, dilakukannya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), dibangunnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, dan dilaksanakannya kegiatan penghijauan (DLH Kabupaten Bandung, 2019). Program ini mulai dilakukan pada tahun 2017 dengan sebanyak 10 desa percontohan, pada tahun 2018 sebanyak 25 desa, dan pada tahun 2019 ini Kampung Sabilulungan Bersih (Saber) akan dikembangkan di sebanyak 40 desa yang ada di Kabupaten Bandung. (Bandungkab.go.id, 2019).

Penelitian ini dilakukan di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Desa Lebak Muncang adalah salah satu Desa Agronomi yang letaknya disebelah selatan Ibukota Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan kondisi persawahan, perbukitan dan pegunungan yang sejuk. Desa ini memiliki luas

wilayah yaitu 800,26 ha dan berada pada ketinggian antara 1200 s/d 1550 dpl. Terdapat sebanyak 29 RW dan 94 RT pada desa ini. Berikut pada gambar 1.1 terdapat struktur organisasi Desa Lebak Muncang pada tahun 2019 :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Desa Lebak Muncang, 2019

Sumber : Kantor Desa Lebak Muncang, 2019.

Dalam memajukan perekonomiannya, desa Lebak Muncang memiliki *home industry* (UKM) sebanyak 49 buah, yang diantaranya bergerak dibidang konveksi dan makanan. Contoh produk yang dihasilkan seperti kecemplung, kopi luwak, dan keripik. Selain itu, terdapat pula produk keset dan pot bunga yang berasal dari daur ulang sampah. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, produk hasil pertanian yang saat ini menjadi unggulan yaitu budidaya tanaman stroberi dan sayur mayur serta potensi pariwisata. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang bergerak dalam bidang *home industry* olahan hasil budidaya stroberi dan kerajinan, perdagangan, jasa perbengkelan, peternakan sapi perah, jasa angkutan, buruh pabrik, PNS. TNI/POLRI, dan wiraswasta lainnya. Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Lebak Muncang meliputi dua hal yaitu pertanian dan

pariwisata. Berikut pada tabel 1.1 terdapat data jumlah penduduk Desa Lebak Muncang pada tahun 2019 :

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Desa Lebak Muncang 2019

Jumlah Penduduk Desa Lebak Muncang				
Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Kepadatan Penduduk
	Perempuan	Laki-laki		
Lebak Muncang	5.808 orang	7.032 orang	12.840 orang	0.290 km/jiwa

Sumber : Kantor Desa Lebak Muncang, 2019

Desa Lebak Muncang menjadi salah satu desa yang terpilih untuk menerapkan program Kampung Sabilulungan Bersih. Dalam menjalankan program tersebut, desa ini menciptakan kader-kader/pengelola Kampung Saber Desa Lebak Muncang. Pengelola ini mulai didirikan pada tahun 2018 dan memiliki 20 anggota yang diantaranya merupakan Karang Taruna, PKK, tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW, serta tokoh agama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 September 2019 kepada Ibu Windya selaku Kabid Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLH, bahwa dari semua program-program yang dilakukan oleh 25 desa yang terdaftar dalam program Kampung Saber, tidak semua desa menerapkan program tersebut dengan baik. Desa yang menerapkan program Kampung Saber dengan baik salah satunya adalah Desa Lebak Muncang. Penilaian yang diberikan tersebut didasarkan pada kegigihan pengelola Kampung Saber dalam melakukan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan lingkungan, dan didasarkan juga dari dukungan kepala desa dalam mewujudkan program Kampung Saber pada desa tersebut. Pengelola Kampung Saber Desa Lebak Muncang pada tahun 2018 memperoleh penghargaan dari Bupati sebagai desa terbaik dalam menerapkan program Kampung Saber ini. Penghargaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Penghargaan sebagai Desa Terbaik Kampung Saber, 2018

Sumber : Kantor Desa Lebak Muncang, 2019.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Saat ini permasalahan lingkungan yang sering terjadi pada sekitar kita adalah masalah kebersihan. Masalah kebersihan tidak lepas dari sampah yang awalnya merupakan produk yang dikonsumsi oleh manusia. Semakin banyaknya kebutuhan manusia sangat berdampak pada kebersihan lingkungan. Sampah tersebut juga dapat mencemari air sungai yang digunakan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Membahas mengenai sampah pasti berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sampah merupakan bagian dari hasil perilaku masyarakat yang harus dikelola dengan tepat. Hamdani (2018) menjelaskan saat ini sebagian dari masyarakat telah mengabaikan kenyamanan lingkungan sekitar. Masyarakat kurang menyadari bahwa lingkungan yang bersih sangat bermanfaat bagi kesehatan mereka. Masalah sampah harus diatasi dengan pengolahan yang tepat agar terciptanya kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Salah satu permasalahan sampah yang terjadi yaitu di Kabupaten Bandung.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bandung, Yula Zulkarnain menyatakan bahwa meningkatnya volume sampah pada Kabupaten Bandung tidak hanya disebabkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung sendiri, melainkan juga berasal dari wisatawan yang sedang berkunjung ke objek wisata, mengingat banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Yula juga mengatakan bahwa

kurangnya armada pengangkut menyebabkan sampah di Kabupaten Bandung tidak sepenuhnya tertangani (Abdalloh, 2019). Berikut pada tabel 1.2 terdapat data tumpukan sampah Kabupaten Bandung pada tahun 2019 :

Tabel 1. 2 Tumpukan Sampah Kabupaten Bandung 2019

Kabupaten	Sampah yang dihasilkan per orang (kg/orang/hari)	Tumpukan sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA (ton/hari)
Kab. Bandung	0,4	1.440	320

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dalam Ferdiansyah, 2019

Fakta yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah bahwa rasio sampah di Kabupaten Bandung dapat mencapai 1.440 ton per hari, dimana hanya 320 ton per hari yang dapat tertangani. Angka tersebut dihasilkan dari penduduk sebanyak 3,5 juta orang di Kabupaten Bandung yang memproduksi 0,4 kg sampah (Ferdiansyah, 2019).

Menurut Fattah (2019) Kabupaten Bandung memiliki kendala dalam mengolah sampah. Yayat Hidayat menjelaskan bahwa biaya untuk menangani sampah di Kabupaten Bandung mencapai Rp30 miliar per tahun yang sudah termasuk biaya restribusi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti sebesar Rp5 miliar. Meskipun ada TPA sampah di Kabupaten Bandung yaitu TPA Legoknangka, sampah dari daerah ini tidak dapat dibuang ke tempat tersebut karena TPA tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung menjadi salah satu faktor permasalahan lingkungan tersebut. Terdapat beberapa faktor pertumbuhan penduduk yang melaju pesat setiap tahunnya. Seperti faktor kelahiran, angka kematian, migrasi/perpindahan penduduk, dan tidak meratanya penyebaran penduduk (Suartha, 2016). Menurut Wang *et al.* (2015) sosial ekonomi merupakan faktor yang paling mempengaruhi kepadatan penduduk pada suatu daerah. Seperti halnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung, semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan banyaknya industri di Kabupaten Bandung menjadikan masyarakat semakin tertarik untuk mencari kerja dan menjadikan Kabupaten Bandung sebagai tempat tinggal.

Kabupaten Bandung memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang besar di Jawa Barat, dapat dilihat dari semakin banyaknya investor yang berinvestasi di daerah tersebut dan semakin banyaknya volume kendaraan yang ada. Beberapa industri seperti properti, jasa, dan tekstil, serta potensi pariwisata menyebabkan penduduk di Kabupaten Bandung menjadi semakin padat (Agustina, 2018). Dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini yang merupakan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bandung tahun 2018 :

Tabel 1. 3 jumlah penduduk di Kabupaten Bandung tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	320405	CILEUNYI	165.052
2	320406	CIMENYAN	114.095
3	320407	CILENGKRANG	53.668
4	320408	BOJONGSOANG	165.052
5	320409	MARGAHAYU	112.680
6	320410	MARGAASIH	165.052
7	320411	KATAPANG	154.320
8	320412	DAYEUKHKOLOT	136.182
9	320413	BANJARAN	135.260
10	320414	PAMEUNGPEUK	96.130
11	320415	PANGALENGAN	154.320
12	320416	ARJASARI	112.426
13	320417	CIMAUNG	80.711
14	320425	CICALENGKA	121.813
15	320426	NAGREG	58.488
16	320427	CIKANCUNG	98.680
17	320428	RANCAEKEK	191.739
18	320429	CIPARAY	191.739
19	320430	PACET	115.724
20	320431	KERTASARI	77.057
21	320432	BALEENDAH	245.914
22	320433	MAJALAYA	159.932
23	320434	SOLOKAN JERUK	87.342
24	320435	PASEH	137.014
25	320436	IBUN	83.903
26	320437	SOREANG	115.098
27	320438	PASIRJAMBU	80.711
28	320439	CIWIDEY	85.861
29	320440	RANCABALI	55.194
30	320444	CANGKUANG	75.200

31	320446	KUTAWIRINGIN	112.426
JUMLAH			3.738.783

Sumber : www.bandungkab.go.id

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Bandung tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2018 yaitu sebanyak 3.738.783 orang. Menurut Kurnia (2019) banyaknya jumlah penduduk tersebut memunculkan permasalahan yang terjadi pada lingkungan.

Penanganan masalah lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sulistiyorini *et al.* (2015) membahas bahwa partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam mendorong keberhasilan pengelolaan lingkungan, sehingga sangat diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat untuk mengurangi dan menangani masalah lingkungan itu sendiri.

Kewajiban menjaga lingkungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 67 dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pengelolaan sampah diatur dalam UU 18 Tahun 2008 pada Pasal 12 yaitu dalam mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya, setiap orang wajib untuk menangani dan mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (DLH Kabupaten Bandung, 2019).

Kegiatan pengurangan sampah harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Baik pemerintah, masyarakat, serta *entrepreneur* wajib melaksanakan kegiatan pengurangan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang biasa disebut *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui cara-cara yang efisien dan terprogram (Putri, 2019). Untuk melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan demi mencapai *sustainability environment* (keberlanjutan lingkungan) diperlukan komitmen yang kuat. Komitmen dapat diartikan sebagai kesediaan individu untuk melakukan kerja keras serta mengorbankan waktu dan tenaganya demi suatu kegiatan maupun pekerjaan (Chukwuka dan Nwomiko, 2018). Sedangkan *environmental commitment* yaitu suatu upaya seseorang untuk menjaga

kelestarian lingkungannya, kemauan individu untuk mengorbankan kesenangan pribadi, meminimalisir pemborosan dalam sumber daya, menggunakan produk yang ramah lingkungan, serta memberi dukungan atas strategi adaptasi pemerintah (Yu *et al.*, 2019). *Environmental commitment* terbagi atas beberapa dimensi yaitu *affective*, *normative*, dan *continuance commitment*. *Affective commitment* berkaitan dengan keterikatan emosional individu dengan lingkungannya. Sementara *normative commitment* menggambarkan perasaan berkewajiban seseorang untuk melakukan pekerjaannya yang disebabkan oleh pengaruh eksternal seperti undang-undang atau peraturan tentang kewajiban menjaga lingkungan. Sedangkan *continuance commitment* berkaitan dengan biaya ekonomi dan sosial dengan mengabaikan masalah lingkungan (Keogh dan Polonsky, 1998 dalam Chukwuka dan Nwomiko, 2018).

Menurut Kainrath (2011:30) komitmen untuk kesadaran lingkungan dapat dilihat dari beberapa hal, yang pertama adalah komitmen yang dibangun untuk menjalankan, kemudian perbuatan yang dilakukan sesuai dengan komitmen yang telah dibangun, perasaan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang diambil, lalu dedikasi yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja lingkungan, dan yang terakhir yaitu tingkat partisipasi dalam permasalahan lingkungan (internal dan eksternal). Untuk mencapai *sustainability environment* (keberlanjutan lingkungan), diperlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama komitmen organisasi dalam memelihara kelestarian lingkungan alam. Komitmen tersebut membutuhkan dukungan dari manajemen lingkungan untuk dijadikan dasar yang efektif terhadap perilaku wirausaha.

Komitmen dinilai penting karena merupakan syarat untuk memperoleh dukungan dari perusahaan untuk strategi yang berhubungan dengan kegiatan lingkungan suatu organisasi. Selain itu, komitmen tersebut akan digunakan untuk menunjukkan baik proses maupun hasil di mana anggota organisasi menunjukkan kepedulian lingkungan. Dalam organisasi, untuk mempertimbangkan kepentingan lingkungan memunculkan tekanan yang berasal dari regulasi, manajemen internal, pertimbangan strategis, dan kekuatan pasar (Keogh dan Polonsky, 1998). *Environmental commitment* didorong oleh peluang ekonomi dan pengaruh dari

pemangku kepentingan, bukan hanya berasal dari nilai-nilai pribadi. Menurut Yu *et al.* (2019) *environmental commitment* memiliki peran yang penting karena digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil lingkungan dengan berkontribusi pada pengurangan sumber daya individu atau pengurangan limbah dan adaptasi perilaku.

Salah satu alternatif yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tentang sampah di Kabupaten Bandung adalah dengan dilakukannya optimalisasi peran serta dan partisipasi masyarakat melalui program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih). Fahmi (2018) menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi pelopor dari program tersebut untuk desa yang belum diintervensi program *ecovillage*. Tujuan dari Kampung Saber yaitu terciptanya kampung/desa dimana masyarakatnya dapat memahami masalah lingkungan hidup secara mandiri dan menemukan solusi atas masalah tersebut, serta melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat terwujudnya kampung yang bersih dan nyaman.

Program ini dibuat dengan maksud untuk membangun budaya dan perilaku ramah lingkungan yang bertumpu pada prinsip sabilulungan (gotong royong) dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan program tersebut dibutuhkan kader-kader yang berpartisipasi seperti aparat desa, BPD, LSM Ketua RW, PKK, pelaku usaha, kelompok tani/ternak, karang taruna, tokoh, dll. Terdapat beberapa indikator dari program Kampung Saber yaitu terciptanya kader lingkungan yang menjadi pelopor kegiatan-kegiatan lingkungan hidup, menimbulkan kebiasaan gotong royong antar masyarakat, dilakukannya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, dibangunnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, dan dilaksanakannya kegiatan penghijauan (DLH Kabupaten Bandung, 2019).

Program ini mulai dilakukan pada tahun 2017 dengan sebanyak 10 desa percontohan, dan pada tahun 2018 sebanyak 25 desa yang menjadi percontohan Kampung Saber. Salah satu desa yang menjadi desa percontohan adalah Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Desa Lebak Muncang memiliki potensi yang cukup baik dalam sumber daya alam maupun sumberdaya manusia untuk dijadikan modal utama dalam rangka menyelenggarakan program

pemerintah. Desa ini menjadi Desa Saber mulai dari bulan Mei pada tahun 2018. Desa tersebut memiliki pengelola Kampung Saber yang diikuti oleh sebanyak 20 anggota, yang diantaranya diikuti oleh PKK, Karang Taruna, tokoh agama, Ketua RT dan RW. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan (Satapok), LCO (Lubang Cerdas Organik), melakukan sosialisasi kepada warga mengenai sampah, Karang Taruna Turun Kampung (Katapung) (Apri, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu upaya pengelola Kampung Saber di Desa Lebak Muncang dalam menerapkan program sabilulungan bersih adalah dengan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai masalah lingkungan, dan terus-menerus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Harapannya yaitu dapat meminimalisir imbas sampah yang ada, serta menciptakan lingkungan yang bersih (Apri, 2019).

Dalam menerapkan program Kampung Saber, pengelola memiliki prinsip utama agar dapat berkomitmen dalam menjalankan program tersebut, yaitu prinsip keterbukaan. Menurut Ketua Pengelola kampung Saber, Apri menyatakan bahwa organisasi akan berjalan dengan baik ketika adanya keterbukaan. Pada awalnya, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pengelola kampung saber, seperti adanya perspektif yang buruk dari beberapa penduduk desa bahwa mengelola sampah merupakan kegiatan yang kotor dan tidak menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga mereka enggan berpartisipasi dalam kegiatan program Kampung Saber ini.

Hambatan lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari beberapa penduduk setempat dalam mengurangi penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan. Mereka hanya berorientasi pada nilai ekonomis, sehingga mereka berfokus pada penerapan *recycle* (daur ulang) agar sampah tersebut dapat dijual kembali, dibandingkan dengan penerapan *reduce* (pengurangan). Padahal, seharusnya penduduk menyadari bahwa saat ini hal yang paling penting untuk dilakukan yaitu mengurangi konsumsi produk yang menyebabkan penumpukan sampah. Namun hambatan-hambatan tersebut sedikit demi sedikit dapat dilalui dengan sosialisasi

mengenai pengurangan sampah yang dilakukan secara rutin oleh pengelola kampung saber.

Keterikatan pengelola Kampung Saber terhadap pekerjaannya akan mengarah pada ketiga dimensi yang ada pada *eco-commitment*, yaitu *affective commitment*, *continuance commitment*, dan *normative commitment*. Dimensi *eco-commitment* yang berbeda akan mendukung berbagai orientasi kewirausahaan dan perilaku yang terkait. Orientasi ini cenderung menjadikan individu lebih condong ke arah fokus yang spesifik dari kepedulian lingkungan organisasi, aktivitas, atau praktik (Keogh dan Polonsky, 1998).

Memahami *eco-commitment* pengelola dalam menerapkan program Kampung Sabilulungan Bersih sangatlah penting. Berdasarkan pernyataan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana *eco-commitment* yang dimiliki oleh pengelola dalam menerapkan program Kampung Sabilulungan Bersih di Desa Lebak Muncang. Maka, penulis akan mengambil judul **“ECO-COMMITMENT PENGELOLA DALAM MENERAPKAN PROGRAM KAMPUNG SABILULUNGAN BERSIH PADA DESA LEBAK MUNCANG”**.

1.3 Perumusan Masalah

Jumlah sampah yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk membutuhkan penanganan yang tepat. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka menanggulangi sampah yaitu dengan mengadakan program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) yang diterapkan pada berbagai desa di Kabupaten Bandung.

Desa Lebak Muncang merupakan salah satu desa yang terdaftar dalam program Kampung Saber ini. Dalam penerapannya, desa tersebut telah menjalankan program ini dengan sangat baik, sehingga Desa Lebak Muncang diberikan penghargaan atas keberhasilannya dalam menerapkan program Kampung Saber ini. Atas keberhasilannya tersebut, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan *eco-commitment* pengelola dalam menjalankan program Kampung Sabilulungan bersih.

Untuk melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan demi mencapai *sustainability environment* (keberlanjutan lingkungan) diperlukan komitmen yang

kuat. *Environmental commitment* memiliki peran yang penting karena digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil lingkungan dengan berkontribusi pada pengurangan sumber daya atau pengurangan limbah (Yu et al., 2019). Oleh karena itu, komitmen pengelola dalam menerapkan program Kampung Sabilulungan Bersih masih perlu diteliti lebih lanjut lagi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan penelitian. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut.

1. Bagaimana penerapan *normative commitment* pada pengelola Kampung Saber?
2. Bagaimana penerapan *affective commitment* pada pengelola Kampung Saber?
3. Bagaimana penerapan *continuance commitment* pada pengelola Kampung Saber?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan penelitian. Berikut merupakan tujuan penelitian tersebut.

1. Untuk mengetahui penerapan *normative commitment* pada pengelola Kampung Saber.
2. Untuk mengetahui penerapan *affective commitment* pada pengelola Kampung Saber
3. Untuk mengetahui penerapan *continuance commitment* pada pengelola Kampung Saber.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat manfaat penelitian yang terdiri atas dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1.6.1. Aspek Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan untuk jenis objek yang baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini terfokus pada objek yang berupa masyarakat pedesaan. Hal tersebut diharapkan memberikan wawasan baru dalam bidang penelitian bahwa variabel *eo-*

commitment ini juga dapat digunakan pada jenis objek tersebut. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan *eco-commitment* dan sub-konsepnya.

1.6.2. Aspek Praktis.

1. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran variabel komitmen mana yang paling dominan, sehingga dapat memberikan pencerahan bagi pengelola agar mengetahui apakah komitmen yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan mereka dalam menjalankan program kampung sabilulungan bersih ini, yaitu terciptanya lingkungan desa yang lebih baik.

2. Penelitian ini diharapkan juga mampu menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya peran serta mereka dalam memperbaiki masalah lingkungan yang ada, serta mampu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan demi tercapainya keberlanjutan lingkungan.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan di wilayah desa.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan dan sebagai kejelasan penulisan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Realibilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.